


Dakwah Dan Pendidikan Sarekat Islam Sebagai Fase Pembuaian Nilai-Nilai Pancasila

 Anggit Rizkianto^{✉1}
Informasi artikel

Sejarah Artikel :
Diterima November
2021
Revisi Desember 2021
Dipublikasikan Januari
2022

Keywords :

*Sarekat Islam, Da'wah,
Education,, Pancasila*

ABSTRAK

Sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara, nilai-nilai Pancasila terlebih dahulu melalui fase pembuaian. Artinya, gagasan-gagasannya sudah tumbuh jauh sebelum dibahas secara formal (dalam sidang BPUPK maupun PPKI). Studi ini bermaksud mengungkap lebih jauh proses pembuaian nilai-nilai Pancasila dalam suatu pergerakan kelompok Islam, yakni Sarekat Islam, khususnya dalam bidang dakwah dan pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari gerakan kelompok tersebut sejak masa-masa dekade kedua abad ke-20. Studi ini merupakan studi kepustakaan di mana data didapatkan melalui metode dokumentasi dengan menggunakan literatur-literatur sejarah yang berbicara tentang gerakan Sarekat Islam. Kemudian digunakan metode triangulasi sumber data untuk menguji kredibilitas data. Hasil studi menunjukkan bahwa dakwah dan pendidikan yang diperjuangkan Sarekat Islam semakin menegaskan bahwa pembuaian nilai-nilai Pancasila sudah dimulai sejak masa-masa awal pergerakan nasional. Sarekat Islam memainkan peran penting dalam proses intelektual dan kultural untuk membangun kesadaran akan kebangsaan (nasionalisme), kemanusiaan, pemerintahan yang demokratis, penegakkan keadilan, serta keberagamaan. Kesadaran-kesadaran tersebut terus membentuk dialektika pemikiran-ideologis, dan menjadi bibit nilai-nilai Pancasila.

How to Cite :

Anggit. (2022). Dakwah Dan Pendidikan Sarekat Islam Sebagai Fase Pembuaian Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), pp. 25-36. DOI: <http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v7.n1.2022.pp25-36>

ABSTRACT

Da'wah And Islamic Sarekat Education As A Phase Of Producing Pancasila Values. Before being formulated and ratified as the basis of the state, the values of Pancasila went through the seeding phase. In other words, the ideas of Pancasila have grown before they were formally discussed (in BPUPK and PPKI council). This study intends to reveal the seeding process of Pancasila values in an Islamic group movement called Sarekat Islam, especially in the fields of da'wah and education which have been inseparable from this organization since the second decade of the 20th century. This study is a literature study, and the data is were collected through the documentation method using historical literature about the Sarekat Islam movement. Then, source triangulation method was used to test the credibility of the data. The result of the study shows that the da'wah and education of Sarekat Islam assert that the conception of Pancasila values has started since the early days of the national movement. Sarekat Islam played an important role in intellectual and cultural processes to build awareness of nationality (nationalism), humanity, democratic governance, enforcement of justice, and religiosity. Those have formed the dialectic of thoughts-ideology, and became the seeds of the values of Pancasila.

✉ Alamat korespondensi:

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hadid Surabaya, Kota Surabaya, Indonesia.

✉ E-mail:

amgitrizkianto@gmail.com

Copyright © 2022 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Pancasila adalah konsensus politik sekaligus falsafah kenegaraan bagi bangsa Indonesia yang merdeka. Meski begitu, dalam proses pembentukannya Pancasila tetap tidak dapat dilepaskan dari perdebatan yang panjang para *founding fathers* bangsa Indonesia.

Perdebatan itu secara umum berasal dari kelompok Islam dengan kelompok nasionalis ketika membicarakan tentang dasar negara. Kelompok Islam menginginkan agama Islam sebagai dasar negara, sedangkan kelompok nasionalis yang cenderung sekuler ingin memisahkan agama dari negara (Fathani and

Qodir 2020). Pancasila lantas hadir sebagai pemersatu. Persatuan dibangun atas dasar kesepahaman dan kesalingpengertian akan persamaan maupun perbedaan nilai yang selama ini eksis di dalam masyarakat Indonesia. Apa yang ada dalam Pancasila membentuk ikatan yang bersifat emosional dalam rangka mencapai tujuan hidup bermasyarakat sekaligus bernegara (Abidin 2020).

Sejarah terbentuknya Pancasila tentu tidak muncul begitu saja. Pancasila terbentuk melewati beberapa fase, dan sebagai suatu pemikiran, Pancasila tidak dapat dipisahkan dari para pemikir yang melahirkannya. Untuk melacak proses terbentuknya Pancasila, maka mutlak harus menilik pemikiran yang menciptakan rahim gagasan Pancasila itu, yakni pemikiran Bung Karno (Latif 2012). Gagasan-gagasan Pancasila secara historis dibentuk oleh pemikiran Bung Karno yang melewati berbagai babakan lintasan waktu. Gagasan keindonesiaan dikonstruksi dalam setiap babakan waktu itu. Oleh sebab itu, ada tiga fase terbentuknya Pancasila, yang secara umum menggambarkan Pancasila mulai dari ia lahir sebagai ide sampai digunakan sebagai dasar Indonesia merdeka. Fase tersebut antara lain: 1.) Fase pembibitan atau pemuatan 2.) Fase perumusan 3.) Fase pengesahan (Latif 2012).

Fase pemuatan secara umum menjelaskan proses rintisan gagasan-gagasan Pancasila melalui pencarian sintesis antar-ideologi. Fase ini juga disebut sebagai upaya “penemuan” Indonesia dengan menggali kode kebangsaan bersama-sama (*civic nationalism*) yang sudah berlangsung sejak masa-masa pergerakan nasional. Fase perumusan menjelaskan proses pembicaraan gagasan Pancasila dalam suatu badan formal ketika Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Gagasan Pancasila didiskusikan bahkan didebatkan dalam beberapa forum mulai dari BPUPK Pertama, Panitia Sembilan, BPUPK kedua dan menemui beberapa dinamika sampai kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Fase pengesahan adalah fase yang menentukan ketika diputuskan bahwa Pancasila adalah dasar Indonesia merdeka. Pengesahan Pancasila juga disertai dengan pengesahan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada puncaknya, Pancasila menjadi gagasan kenegaraan yang koheren dan saling mengikat (Utama 2014).

Konseptualisasi Pancasila melibatkan partisipasi banyak pihak atau kelompok dan melewati proses waktu yang panjang. Fase pemuatan tentu saja adalah fase yang paling panjang, dan di fase itulah segala proses dialektika gagasan dan pemikiran terjadi untuk menemukan suatu sintesa tentang keindonesiaan. Fase pemuatan Pancasila diyakini sudah dimulai sejak masa-masa 1920an bahkan sebelum itu, saat kaum bumiputra sudah mulai memikirkan terkait konstruksi kebangsaan Indonesia.

Perhimpunan Indonesia (PI) yang berkedudukan di Belanda diyakini memiliki peran penting dalam menciptakan gagasan persatuan nasional. Sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928, manifesto politik PI tahun 1925 telah membayangkan tentang nation Indonesia, demokrasi, otonomi serta kemerdekaan (Rahmad and Trilaksana 2021). Namun, produk pemikiran PI sebetulnya dipengaruhi pula oleh Indische Partij. Sebelum para tokoh Indische Partij memengaruhi gagasan politik PI, perkumpulan ini masih merancang cita-citanya pada kisaran tahun 1908-1913 (Nagazumi 1986). Tjiptomangoenkusumo, salah satu tokoh Indische Partij, menggagas tentang "kesatuan dalam perbedaan" dengan maksud agar tercipta keselarasan dan saling menghormati karena semua manusia sederajat (Scherer 1985). Douwes Dekker, tokoh Indische Partij yang lain, memperkuat gagasan tersebut, bahwa gagasan Indonesia bukan kesatuan yang didirikan atas kesamaan etnis ataupun agama, tetapi rasa kesamaan pengalaman dan solidaritas khusus yang mengalir darinya (Elson 2008). Pemuatan Pancasila juga kerap dikaitkan dengan Tan Malaka yang menulis buku *Naar de Republiek Indonesia*. Tan berpandangan bahwa demokrasi atau paham kedaulatan rakyat mengakar kuat pada kebudayaan nusantara. Meskipun dia seorang marxis, tapi sikapnya tetap tidak melupakan realitas-realitas nasional sehingga ia mau bekerjasama dengan berbagai kelompok revolusioner lain (Latif 2012).

Bersamaan dengan itu, kelompok Islam juga diyakini memainkan peran penting dalam proses pembibitan nilai-nilai Pancasila. Gerakan Sarekat Islam (SI) yang dinilai sebagai gerakan paling progresif dalam dekade kedua abad ke-20 turut membentuk pikiran Bung Karno. Hal ini terlihat dari pengakuan Bung Karno sendiri yang mengungkapkan bahwa Tjokroaminoto, tokoh paling penting dalam SI,

sangat memengaruhi pemikirannya bahkan hidupnya (Yatim 1999); (Adams 2014); (Fahrudin 2020). Tjokroaminoto pulalah yang kemudian mengidealisasikan suatu sintesis antara Islam, sosialisme dan demokrasi. Pimpinan SI itu mengungkapkan, “Jika kita, kaum Muslim, benar-benar memahami dan secara sungguh-sungguh melaksanakan ajaran-ajaran Islam, kita pastilah akan menjadi para demokrat dan sosialis sejati.” Tjokroaminoto juga merupakan tokoh penting yang memengaruhi pandangan Bung Karno tentang front persatuan selain Tjiptomangoenkusumo (Dahm 1987).

Islam yang menjadi motor penggerak gerakan SI membawa organisasi tersebut yang mulanya bergerak secara sosial ekonomi kemudian berkembang di berbagai lini, mulai dari dakwah keagamaan, pendidikan, sampai politik. Sampai kemudian gerakan ini berkembang menjadi partai politik dan memiliki sumbangsinya sendiri terhadap nasionalisme Indonesia, baik dalam pengertian positif maupun negatif (Djaelani 2017). Perjuangannya juga memunculkan kesadaran kaum bumiputra terhadap martabat kemanusiaan dan harga diri sebagai suatu bangsa. Hal tersebut lantas menyadarkan pemerintah kolonial Belanda akan keinginan kaum bumiputra untuk membentuk pemerintahan sendiri sebagai bangsa merdeka (Rasyid and Tamara 2020).

Dakwah Islam dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dilepaskan dari gerakan SI. Pasalnya, Islam adalah azas gerakan organisasi ini, sehingga penegakkan tauhid selalu menjadi yang utama. Semua perjuangan organisasi harus didasari oleh motif keagamaan, yang dalam hal ini adalah Islam. Maka, semua yang diperjuangkan SI senantiasa disertai dengan penyadaran ketauhidan maupun perbaikan moralitas ke arah yang lebih baik. Selain itu, SI sejak awal berdirinya selalu memiliki tujuan memberdayakan masyarakat, khususnya kaum pribumi. Untuk itulah kemudian pendidikan diperjuangkan. Sebagaimana sekolah-sekolah partikelir lain lain, sekolah-sekolah Sarekat Islam dibangun sebagai jawaban atas masalah-masalah ketimpangan dalam dunia pendidikan akibat sistem pendidikan kolonial Belanda. Gerakan Islam yang bercirikan ratu adil dikembangkan ke arah pengembangan intelektual melalui pendidikan, karena pendidikan dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia. Bahkan, seorang manusia akan

dipandang sebagai seutuhnya manusia karena pendidikan (Rosenthal 1971); (Mansur 2013). Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan yang dilakukan oleh SI memiliki kecenderungan pada pembentukan kemandirian para pribumi muslim, agar mereka dapat berdaya dan tidak terus menerus direndahkan oleh sistem ketidakadilan kolonialisme. Agaknya inilah yang melahirkan argumen bahwa kemandirian merupakan tema dari gerakan SI (Latif 2012).

Studi ini bermaksud bermaksud mengungkap lebih jauh proses pembuahan nilai-nilai Pancasila dalam gerakan SI, khususnya dalam bidang dakwah dan pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari gerakan kelompok tersebut sejak masa-masa dekade kedua abad ke-20. Harapannya, studi ini dapat meneguhkan Pancasila itu sendiri sebagai suatu gagasan yang menjadi konsensus sekaligus falsafah kenegaraan bangsa Indonesia, bahwa kelahirannya juga melibatkan partisipasi kelompok Islam. Partisipasi itu tidak hanya dalam proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagaimana yang sudah banyak diungkap, tetapi juga dalam pembuahan gagasan, yang terus berkembang sebagai suatu dialektika pemikiran-ideologis secara historis.

METODE

Studi termasuk studi kepustakaan, yaitu studi yang data-datanya hanya bisa didapat melalui teknik dokumentasi dari sumber-sumber yang bersifat sekunder (Zed 2004). Data didapatkan melalui sumber-sumber teks yang dianggap relevan dan otoritatif, mulai dari buku, laporan penelitian maupun dokumen-dokumen sejarah lainnya. Data-data yang ditemukan akan diuji kredibilitasnya melalui teknik triangulasi sumber, dengan melakukan pengecekan data yang ditemukan dengan sumber-sumber teks lain. Setelah itu barulah dilakukan interpretasi data agar menjadi temuan-temuan yang mempunyai makna, karena studi kualitatif sangat mengandalkan upaya interpretasi terhadap temuan data (Emzir 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang dan Perkembangan Gerakan Sarekat Islam

Organisasi SI bermula dari Sarekat Dagang Islam (SDI), sebuah perkumpulan dagang yang didirikan pada tahun 1911 oleh saudagar batik bernama Haji Samanhudi di Surakarta (Maftuhin and Umamah 2017). SDI hadir sebagai organisasi dalam bentuk koperasi para pedagang batik Jawa, Samanhudi bermaksud memajukan perdagangan kaum pribumi di bawah panji-panji Islam. Tujuan lain Samanhudi adalah menyaingi para pedagang Tionghoa dan membendung kristenisisasi yang sedang marak (Niel 1984). Pada tahun 1912 organisasi ini menjadi Sarekat Islam (SI) setelah masuknya H.O.S Tjokroaminoto, seorang tokoh yang sudah sangat populer dari Surabaya. SI pertama kali menerima badan hukum dari pemerintah kolonial Belanda tepat pada 10 September 1912 (Naqib 1997).

SI mampu memikat ratusan bahkan ribuan pengikut dalam tempo singkat dari beberapa kota di nusantara, mulai dari Madiun, Surabaya, Tegal, Pekalongan, Rembang serta Bandung. Perkembangan itu karena SI semakin bersikap terbuka, mereka tidak hanya merangkul umat Islam dari kalangan Jawa saja, tetapi juga dari kalangan etnis lain. Gerakan kemudian diperluas tidak hanya pada urusan dagang atau ekonomi, tetapi juga bidang-bidang keagamaan, pendidikan bahkan politik. Jumlah anggota SI pun tumbuh dengan cepat, tercapat ada kurang lebih 800.000 ribu anggota pada tahun 1916 (Pringgodigdo 1967). Kepemimpinan Tjokroaminoto yang karismatik sangat berperan besar dalam perkembangan organisasi (Rizkianto 2020).

Cabang-cabang organisasi juga mulai tumbuh. SI mendirikan *Centraal* Sarekat Islam (CSI) sebagai organisasi di tingkat pusat. Secara bertahap kemudian organisasi tingkat lokal di banyak wilayah pulau Jawa didirikan sebelum menyebar hingga ke wilayah lain di luar Pulau Jawa. Cabang-

cabang di wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Bali menyusul kemudian, tercatat saat kongres organisasi tahun 1916 di Bandung di mana sudah ada wakil-wakil Sarekat Islam yang berasal dari pulau-pulau luar Jawa.

Tabel 1. Jumlah cabang SI yang diwakili di kongres Bandung tahun 1916 (Korver 1985)

Perkumpulan SI dari	Jumlah Cabang terwakili	Jumlah cabang seluruhnya
Jawa	50	118
Sumatera	16	38
Kalimantan	7	22
Sulawesi	1	2
Bali	1	1

Perkembangan SI ditopang oleh dukungan beberapa tokoh terkemuka. Tjokroaminoto yang mulai menjabat sebagai pimpinan sejak kongres 2014 di Yogyakarta mengubah banyak hal dalam hal kepemimpinan dan pengelolaan organisasi (Rambe 2008). Selain itu, ada juga Haji Agus Salim dan Abdul Moeis. Keduanya bergabung ke SI sejak tahun 1915. Haji Agus Salim dan Abdul Moeis di kemudian hari memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan gerakan SI, keduanya dikenal sangat gigih membela Islam, terutama ketika SI mendapat serangan infiltrasi dari kelompok (Noer 1996). Gerakan SI memang sangat kental dengan pembelaan terhadap rakyat jelata, yang dimotori oleh para pimpinan-pimpinannya. Para pimpinan organisasi berjuang untuk kepentingan pribumi dengan suatu tekad mulia, yakni melenyapkan kemelaratan dan kemiskinan yang sudah lama diidap oleh rakyat (Amelz 1952). Dakwah islamiyah yang diperjuangkan pun sangat bersifat multidimensi, dengan menjadikan Islam sebagai basis gerakannya, SI tampil dalam berbagai bentuk kepedulian terhadap persoalan sosial yang menggelayuti masyarakat sebagai dampak dari kolonialisme Belanda. Puncaknya, SI mengirimkan beberapa perwakilannya ke lembaga Volksraad, lembaga parlemen yang dibangun Belanda, pada tahun 1917 (Pringgodigdo 1967).

Gerakan SI memang mulai memudar sejak tahun 1920. Konflik internal adalah faktornya, saat gerakan komunis yang dibawa oleh seorang Belanda bernama H.J.F.M Sneevliet menginfiltrasi organisasi ini. Sebagai penikapannya, SI kemudian menetapkan disiplin organisasi. Konsekuensinya, anggota-anggota SI yang berhaluan sosialis komunis wajib keluar dari keanggotaan SI (Muljana 2012).

Pada tahun 1923 SI mengubah bentuk organisasinya menjadi partai dengan nama Partai Sarekat Islam (PSI). Pada perkembangan selanjutnya PSI mengubah kembali namanya dengan nama Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), persisnya pada tahun 1929. Perkembangan nasionalisme cukup berpengaruh dalam perubahan tersebut, di mana SI ingin menunjukkan kemantapannya dalam mendukung kemerdekaan Indonesia (Pringgodigdo 1967).

Dakwah dan Pendidikan Sarekat Islam

Gerakan SI, termasuk dalam hal dakwah dan pendidikan, tidak dapat dipisahkan dari dari azas atau prinsip perjuangan organisasi yang kerap disebut “Trilogi SI”. Trilogi tersebut adalah sebersih-bersihnya tauhid, setinggi-tingginya ilmu dan sepandai-pandainya siyasah. Sebersih-bersih tauhid adalah landasan paling dasar, di mana perjuangan dilandasi oleh agama semata. Dengan demikian itulah maka perjuangan akan terus kokoh (Mansur 2013). Prinsip ini juga mengamanahkan agar semua anggota organisasi harus beragama secara kafah (Ruslin 2012). Setinggi-tinggi ilmu dimaksudkan untuk menavigasi gerakan SI agar tidak melupakan dunia, karena Allah SWT juga memerintahkan umatnya untuk memperjuangkan kesejahteraan. Untuk itu, SI perlu memperjuangkan kemerdekaan pikiran dengan berdasarkan pada iman kepada Islam. Menuntut ilmu adalah hal utama agar umat Islam bebas dari kemelaratan dan kemiskinan, sebab SI meyakini penyebab kemelaratan dan kemiskinan adalah karena umat Islam belum mengoptimalkan akal pikirannya (Gani 1984).

Sepandai-pandai siyasah menekankan pentingnya kecerdasan, kepandaian dan keterampilan dalam lapangan sosial-politik. Tujuannya agar SI dapat menerapkan kebijaksanaan dalam konteks hidup bermasyarakat dan bernegara. Namun, pelaksanaan prinsip ketiga ini tetap harus berkesinambungan dengan prinsip pertama dan kedua dalam Trilogi SI (Mansur 2013).

Dakwah Islam yang diperjuangkan SI sangat fokus terhadap masalah ketauhidan dan moralitas. Islam memang menjadi alat pemersatu bagi SI, namun SI juga hendak mendorong umat muslim agar menjalankan agamanya dengan sepenuh-penuhnya. Umat Islam di Indonesia akan merasakan suatu dunia Islam yang sesungguhnya ketika mereka benar-benar menjalani kehidupan sebagai muslim yang sejati (Tjokroaminoto 1985). Memang kolonialisme selama berabad-abad telah mendorong keislaman para pribumi jauh ke belakang. Umat Islam dijauhkan dari agamanya melalui sekulerisme. Upaya demikian juga disertai dengan misi zending dan kristenisasi. SI sadar akan hal itu dan mencoba memperbaikinya. Tantangan terberat bagi SI adalah adanya ketidakhormatan agama Islam di tengah-tengah masyarakat (Djaelani 2017). Dalam perkara moral, SI sangat mendorong agar umat Islam memiliki moral kerja keras dan mulai meninggalkan berbagai perbuatan asusila serta perjudian (Korver 1985).

Paham keagamaan dan ketauhidan yang diserukan SI bukanlah sesuatu yang terlalu melangit, tetapi begitu membumi karena dekat dengan persoalan umat. Kehadirannya lalu sering dikaitkan dengan hadirnya juru selamat. SI menawarkan harapan-harapan baru yang disebut dengan harapan milenaristik, mengacu pada paham milenarisme, suatu keyakinan akan kemunculan penyelamat yang akan mengubah nasib masyarakat yang tengah menderita (Korver 1985). Dalam kongres SI tahun 1916 Tjokroaminoto mengatakan bahwa kelak tidak akan ada lagi ungkapan-ungkapan *de kleien men* (orang kecil) yang kerap dikatakan

Belanda kepada orang pribumi, sebab setiap manusia itu sama/ sederajat dan kecil jika di hadapan Tuhan (Korver 1985). SI juga menekankan agar umat Islam tidak terjebak pada persoalan-persoalan *furuk*, dan menyuarakan isu-isu fundamental yang penting bagi masyarakat serta bangsa. Organisasi ini juga menaruh perhatian terhadap kesolidan umat. Menghormati dan menghargai perbedaan dalam hal syari'at dan peribadatan dianggap penting. SI juga menyerukan agar umat Islam dapat menghormati pemeluk agama lain dengan tidak intervensi ke dalam urusan keagamaan mereka (Amin 1996).

Dalam hal pendidikan, sebenarnya perhatian SI sudah terlihat sejak organisasi ini masih menjadi SDI. Salah satu tujuan SDI adalah memajukan agama dan sekolah-sekolah Islam, meskipun yang menjadi prioritas tetaplah bidang ekonomi dan perdagangan (Nasihin 2012). Ketika SI mulai berkembang secara kelembagaan dan memiliki banyak cabang, organisasi ini mulai membangun pengajaran dan pendidikan. SI menyadari kebanyakan rakyat memang masih terbelenggu oleh kependiran. Maka, sekolah-sekolah rakyat untuk pribumi pun dibangun di cabang-cabang di daerah. Selain lepas dari penindasan kebodohan, pendidikan juga berperan penting untuk menyelamatkan aqidah-aqidah umat dari segala upaya pelemahan Islam. Lebih dari itu, pendidikan berperan penting agar jasmani dan rohani umat tetap terpelihara dengan baik (Sutidja 2007).

Tepat pada tanggal 21 Juni 1921 dibentuklah sekolah SI di Semarang yang memanfaatkan ruang sidang di gedung SI cabang Semarang. Saat itu murid pertama sekolah berjumlah 50 orang, mereka adalah anak-anak dari anggota SI. Tujuan dibentuknya sekolah itu adalah memberi bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan agar para murid siap terjun di kehidupan sosial kolonial yang serba tidak menguntungkan. Para murid dibekali dengan pelajaran menulis, membaca, berhitung, sejarah, ilmu bumi, bahasa Jawa,

bahasa Melayu serta bahasa Belanda. Para murid juga diberi hak untuk aktif berorganisasi melalui kegiatan berbagai perkumpulan. Pendidikan politik juga mulai dijalankan dengan menyampaikan kewajiban-kewajiban kaum kromo (Wal 1963).

SI meyakini bahwa pendidikan merupakan alat untuk mendatangkan maslahat bagi umat muslim Indonesia, dan lebih luas bagi bangsa Indonesia secara menyeluruh. Untuk misi besar itu, calon-calon guru di sekolah SI juga tak luput dari binaan yang intens. Harapannya, para murid nantinya kelak akan siap untuk bersama-sama dengan rakyat dalam perjuangan politik dan ekonomi. Sekolah-sekolah SI pun berkembang, setidaknya di tahun 1922 sudah ada dua belas sekolah SI yang tersebar di berbagai daerah. Tiap sekolah rata-rata menampung 250 murid (Basri 1997).

Konsep pendidikan SI semakin dimatangkan melalui pidato Tjokroaminoto dalam kongres organisasi tanggal 21 sampai 27 Agustus 1925 di Yogyakarta. Pidato Tjokroaminoto saat itu bertajuk "*Moslem Nationale Onderwijs*" yang secara substansi menjelaskan bahwa pengajaran di sekolah haruslah berupa pendidikan yang dapat membentuk murid menjadi muslim sejati dan bersifat nasional (Tjokroaminoto 1985). Maka, dengan demikian itulah pendidikan mampu membawa pada cita-cita kemerdekaan umat. Sebelumnya, Tjokroaminoto juga pernah menulis artikel dengan tajuk yang sama (*Moslem Nationale Onderwijs*). Dalam artikel tersebut Tjokroaminoto menulis:

Di mana asas Islam itu adalah asas yang menuju democratie dan sosialisme (Sosialisme sejati yang berlandaskan Islam), dan asas tersebut juga bermaksud akan tercapainya cita-cita kemerdekaan ummat dan kemerdekaan negeri tumpah darah, maka kalau kita kaum muslimin mendirikan sekolah-sekolah sendiri, tak boleh tidak pengajaran yang diberikan di dalamnya haruslah pengajaran yang mengandung pendidikan yang akan menjadikan muslim yang sejati dan

bersifat nasional dalam arti kata: menuju maksud akan mencapai cita-cita kemerdekaan umat (Amelz 1952).

SI kemudian juga menggagas terkait jenjang pendidikan yang dapat dibagi menjadi tiga jenjang. Jenjang pertama adalah pendidikan dasar yang dapat ditempuh selama lima, enam atau tujuh tahun yang disebut sebagai *Lader Onderwijs*. Jenjang selanjutnya adalah pendidikan menengah yang dapat ditempuh selama empat atau lima tahun yang disebut sebagai *Middelbaar Onderwijs*. Jenjang terakhir merupakan pendidikan tingkat universitas yang disebut sebagai *Hooger Onderwijs*. Tiap jenjang pendidikan harus mengajarkan pendidikan ilmu agama Islam sekaligus ilmu pengetahuan yang bersifat umum, dan diajarkan orang yang benar-benar ahli dalam bidang-bidang ilmu yang telah spesifik (Amelz 1952). Konsep pendidikan semacam itu tidak dapat dilepaskan dari tujuan besar pendidikan SI, yakni menyadarkan dan membebaskan umat dari keterkungkungan akibat kolonialisme (Mokodenseho 2020).

Nilai-Nilia Perjuangan Sarekat Islam sebagai Fase Pembukaan Pancasila

Sedari awal, pergerakan SI sudah bersifat multidimensi. Artinya, sekalipun gerakan berbasiskan keislaman, tetapi perjuangannya berorientasi perubahan sosial di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi bahkan politik. Jika membacanya dari perspektif lahirnya kesadaran nasional, secara paralel perkembangan SI beriringan dengan perkembangan organisasi-organisasi lain yang juga berkembang pada masa pergerakan, seperti Budi utomo yang mewakili gerakan nasionalisme Jawa, Paguyuban Pasundan yang mewakili nasionalisme Sunda, Serikat Sumatera yang mewakili nasionalisme Sumatera dan lain sebagainya. Sebagaimana SI, organisasi-organisasi tersebut memiliki latar belakang gerakannya masing-masing (Djaelani 2017). Namun, SI adalah organisasi pertama yang bergerak dalam skala nasional yang lebih luas, artinya tidak lagi disekat-

sekat oleh kesamaan etnis/ suku tertentu. Kongres SI tahun 1916 di Bandung adalah buktinya. Kongres yang dihadiri oleh seluruh cabang SI baik yang ada di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Bali itu adalah kongres pertama yang bersifat "nasional" yang diselenggarakan oleh kalangan bumiputra. SI adalah organisasi pertama yang berani menyematkan istilah "nasional" dalam pertemuan skala besar yang semacam itu. Maka, kongres itu sebenarnya bukan sekadar menunjukkan bahwa gerakan SI telah tersebar di berbagai penjuru tanah air, tetapi juga suatu usaha sadar untuk menegakkan cita-cita nasionalisme dalam skala luas dengan Islam sebagai dasarnya.

Kongres dan forum-forum yang diselenggarakan SI lantas digunakan untuk mendidik rakyat. SI menunjukkan masalah-masalah yang tengah terjadi dan diidap oleh masyarakat, sekaligus menyampaikannya gagasan dan pemikiran dari para pimpinan SI sebagai penyikapannya. Perhatian SI ini kemudian menimbulkan perasaan diperhatikan, dilindungi serta diperjuangan dari rakyat. Juga menumbuhkan kesadaran dari rakyat akan kondisi mereka yang terbelakang dalam berbagai bidang kehidupan. Hal inilah yang kemudian membangkitkan semangat berusaha dari rakyat agar mereka memperbaiki keadaan, mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya ini terus berkembang hingga mencapai pada kesadaran nasionalisme (Rasyid and Tamara 2020). Gagasan-gagasan untuk lepas dari penjajahan pun mulai diperbincangkan. Tjokroaminoto memainkan peran penting dalam hal ini, itulah sebabnya ia disebut sebagai pemimpin dengan tipe *solidarity maker* (Rambe 2008). Tjokroaminoto kemudian juga menyampaikan kepada para anggota SI terkait gagasannya tentang *Zelfbestuur* atau pemerintahan sendiri (Mulawarman 2015). Gagasan tersebut menandakan adanya suatu komitmen dari SI untuk mencapai kemerdekaan. Pembangunan solidaritas dan upaya mencapai kemerdekaan adalah dua hal yang tak terpisahkan dari gerakan dakwah dan pengajaran dalam SI.

Itulah sebabnya SI menekankan agar umat Islam tidak terjebak dalam hal-hal yang bersifat *furuk*, karena itu akan mengancam solidaritas umat, padahal kesolidan amat penting untuk melawan kolonialisme.

Peri-kebangsaan atau kebangsaan Indonesia yang merupakan salah satu prinsip dalam Pancasila sangat bertumpu pada kecintaan terhadap bangsa dan tanah air, yang tidak lain adalah gagasan nasionalisme itu sendiri. Bangsa Indonesia lebih dari sekadar golongan yang memiliki kehendak bersatu di atas daerah kecil seperti Jawa, Minangkabau, Madura, Yogya, atau Bugis. Bangsa Indonesia adalah manusia-manusia yang secara geopolitik sudah ditentukan tinggal di kesatuan wilayah yang terdiri dari pulau-pulau Indonesia mulai dari ujung Sumatra sampai ujung Papua (Sukarno 1964). Bangsa yang memiliki kehendak bersatu bangsa Indonesia itu pada akhirnya memiliki kesamaan watak atau karakter. Itulah yang kiranya diperjuangkan dalam gerakan SI. Organisasi ini mencoba menyemai identitas kebangsaan dalam setiap dakwah keagamaan dan pendidikannya. Meluaskan gerakan hingga ke luar pulau Jawa adalah upaya SI agar tumbuh kesadaran akan identitas bangsa yang melampaui sekat-sekat etnis. Nasionalisme coba disemai secara perlahan. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa nasionalisme itu masih dibatasi oleh identitas keagamaan (Islam), tetapi ia sudah menjadi alat yang ampuh untuk mempersatukan rakyat dalam skala luas.

Kebangsaan Indonesia senantiasa mengandung spirit anti penjajahan. Tak ada satupun pergerakan kemerdekaan yang lepas dari semangat kebangsaan (Soeprapto 2013). Apa yang disemai oleh gerakan SI juga membawa spirit ini. *Zelfbestuur* yang diserukan Tjokroaminoto secara tidak langsung mencoba menyadarkan kepada para anggota SI agar mereka dapat lepas dari pemerintahan kolonial. SI adalah salah satu gerbong gerakan nasionalis yang cenderung bersifat kultural, bersamaan dengan gerakan lain seperti Indische Partij dan Perhimpunan

Indonesia. Di kemudian hari, gerakan ini diikuti oleh Bung Karno yang mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) di kota Bandung pada tahun 1927 (Fahrudin 2020).

Di sisi lain, gerakan SI juga memiliki dimensi kemanusiaan. Kolonialisme telah menindas rakyat sedemikian rupa dan merendahkan martabat kemanusiaan. Transformasi organisasi dari SDI menjadi SI sedikit banyak juga didorong oleh banyaknya persoalan di banyak bidang yang disebabkan penjajahan, sehingga memunculkan kesadaran bahwa kekejaman, diskriminasi dan pendidikan terhadap rakyat Indonesia harus segera ditiadakan (Suryanegara 1996). Bangsa penjajah merendahkan martabat pribumi sehingga mereka begitu menjadi rendah diri. SI kemudian mendidik rakyat agar mereka tak lagi memiliki mental merendahkan diri di hadapan bangsa penjajah. Tjokroaminoto mengemukakan bahwa “sang manusia rendah diri” harus melenyapkan kesadaran rasa rendah dirinya terhadap bangsa Eropa, karena semua manusia adalah sederajat di hadapan Tuhan (Korver 1985). SI juga menyadari bahwa rakyat jelata atau masyarakat kelas bawah adalah yang paling menderita dalam sistem yang dibangun kolonialisme. Oleh karenanya, pembelaan SI terhadap kemanusiaan dan perlawanannya terhadap penindasan kelas mawujud dalam berbagai bentuk pengajaran dan pemberdayaan kalangan buruh atau pekerja. Para buruh harus berdaya dan sejahtera agar posisi mereka kuat di hadapan majikannya (Amelz 1952).

Tampaklah bahwa peri-kemanusiaan telah menjadi salah satu prinsip atau nilai perjuangan dalam gerakan SI. Dalam konteks kolonialisme, nilai kemanusiaan itu salah satu jalan untuk membebaskan rakyat dari keterkungkungan sistem yang menindas. Bung Hatta sendiri menyatakan kemanusiaan adalah fundamen politik dalam Pancasila. Dalam segala segi kehidupan, dasar kemanusiaan itu harus terlaksana. Artinya, kemanusiaan yang menuntun segala hubungan antara orang dengan orang, antara majikan dengan buruh, dan antara bangsa dengan

bangsa (Soeprapto 2013). Di kemudian hari, Bung Karno memang merekonstruksi sila kemanusiaan ke arah persaudaraan bangsa-bangsa atau yang biasa disebutnya dengan internasionalisme. Hanya saja, dalam konteks perjuangan SI, yang lebih menjadi fokus adalah menyemaikan kemanusiaan dalam konteks internal bangsa Indonesia sendiri karena masalah terbesar yang dihadapi adalah kolonialisme. Namun, hal tersebut tidak melupakan spirit dari kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan ataupun internasionalisme bermaksud melawan chauvinisme atau bahkan fasisme, sebuah paham nasionalisme melampaui batas yang menyebabkan terjadinya penjajahan terhadap suku bangsa lain (Rizkianto 2021). Dalam konteks gerakan SI, hal itu diperjuangkan dengan persaudaraan tanpa memandang suku, ras, kelas sosial, maupun batas-batas wilayah atau pulau. Jemaah yang diciptakan SI adalah komunitas yang sangat majemuk, para anggota dan simpatisannya berasal dari kalangan santri, abangan, priyayi, buruh, petani dan kaum marjinal lainnya (Marihandono and dkk 2015). Apa yang dibangun SI melawan tatanan sosial kolonialisme yang kental dengan diskriminasi dan penindasan.

Apa yang diajarkan oleh SI bukan hanya ilmu agama Islam dan moral, tetapi juga nilai-nilai kemerdekaan dan demokrasi agar nantinya para murid-murid SI tidak mudah terperangkap dalam permasalahan perbedaan dan sosial. Untuk merealisasikannya, pada tahun 1927 SI membentuk pendidikan kepanduan yang berlandaskan Islam, di mana istilah "kepanduan" itu sebetulnya sebagai pengganti istilah *scouting (padvinder)* yang sebelumnya diciptakan Baden Powel (Kartini 2014). Bagi SI, penanaman nilai-nilai kebangsaan harus berjalan secara paralel dengan nilai-nilai demokrasi. Hal ini dapat dilacak dari perjuangan SI pada dekade abad ke-20. Sebagai gerakan dakwah dan pendidikan, SI tidaklah anti terhadap politik. Organisasi ini justru menjadikan politik sebagai alat. Namun, perjuangan politik SI dilakukan dengan prinsip-prinsip demokratis.

Sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem kolonialisme, Tjokroaminoto mendesak Belanda untuk segera merealisasikan pembentukan Volksraad, sebuah dewan rakyat yang memberi tempat bagi wakil-wakil dari kalangan pribumi. Saat lembaga itu terbentuk, SI mengirimkan wakil-wakilnya, selain Tjokroaminoto, juga ada Agus Salim dan Abdul Moeis (Maftuhin and Umamah 2017). Bagi Abdul Moeis misalnya, Volksraad adalah forum untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan umat Islam kepada pemerintah kolonial. Meski perjuangan melalui Volksraad tidak sepenuhnya berhasil, tapi setidaknya wakil-wakil SI dapat menjadi "rem" terhadap anggota parlemen Belanda yang konservatif dan berpihak kepada kolonialisme (Noer 1996).

Dalam gagasan Pancasila Bung Karno, badan perwakilan rakyat merupakan elemen penting dalam mewujudkan gagasan kerakyatan atau demokrasi Indonesia. Semua aspirasi dan tuntutan rakyat, termasuk tuntutan orang-orang Islam, sebaiknya diperjuangkan melalui suatu permusyawaratan dalam wadah perwakilan tersebut (Sukarno 1964). Bagi Bung Karno, demokrasi Indonesia harus berbeda dengan demokrasi barat yang berdasarkan *free fight* atau hantam-hantaman. Bung Karno beranggapan *Free fight democracy* berbahaya bagi Indonesia, karena akan mengakibatkan perpecahan nasional dan menghambat usaha-usaha pembangunan (Hatta 1966). Apa yang diperjuangkan SI adalah bentuk demokrasi yang demikian. Berjuang di Volksraad adalah bentuk ikhtiar para elite atau pimpinan SI. Meski wadah perwakilan itu tidak sepenuhnya membuahkan hasil yang memuaskan, tetapi wakil-wakil SI tetap bersikap sportif. SI memilih bermusyawarah, bernegosiasi dan berdebat secara bermartabat alih-alih berpolitik secara radikal. Ini menunjukkan komitmen SI terhadap demokrasi. Tjokroaminoto memang sangat menyadari pentingnya rapat umum dan berpidato menggalang massa, tapi terlepas dari itu, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga nilai-nilai demokrasi untuk membela

kepentingan rakyat. Maka, dalam rapat-rapat organisasi, Tjokroaminoto selalu membuka ruang diskusi dan perdebatan, dan selalu mencari jalan tengah terbaik dalam membuat keputusan. Hal semacam ini juga ia ajarkan kepada para pelajar indekos di rumahnya di Jalan Peneleh di Surabaya, termasuk di antaranya Sukarno, Alimin Prawirodirdjo, Musso dan Kartosoewiryo (Hakim and Wirano 2020).

Tjokroaminoto berpandangan bahwa demokrasi dan sosialisme sejalan dengan asas-asas Islam. Memperjuangkan demokrasi harus bersamaan dengan memperjuangkan sosialisme Islam. Demokrasi umumnya muncul dari paham individualisme, dan sosialisme adalah kemajuan dari demokrasi (Tjokroaminoto 2010). Maka, gagasan tentang sosialisme yang berdasarkan Islam pun didakwahkan, di antaranya melalui tulisan bertajuk “Islam dan Sosialisme” yang pertama kali diterbitkan pada September 2022 melalui media Soeara Boemipoetra (Hakim and Wirano 2020). Bagi Tjokroaminoto, sosialisme Islam adalah sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang menyenangkan hati sesama manusia, menolong orang susah, memberi makan orang lapar, meringankan kesedihan orang yang berduka cita, dan menghindari barang atau benda yang didapat dengan membuat kesusahan orang lain (Tjokroaminoto 2010).

Gagasan sosialisme Islam memiliki benang merah dengan gagasan keadilan sosial Pancasila, atau yang dalam istilah Bung Karno adalah kesejahteraan sosial. Dalam pandangan Bung Karno, demokrasi Indonesia haruslah demokrasi permusyawaratan yang memberi hidup; demokrasi yang mendatangkan kesejahteraan (Sukarno 1964). Persamaan hak bukan hanya diciptakan di lapangan politik, tetapi juga ekonomi, sehingga tercipta kesejahteraan bersama. Agaknya, baik SI maupun para penggagas Pancasila memiliki kesamaan dalam memandang persoalan demokrasi dan ekonomi, keduanya tetap mengingkingkan prinsip-prinsip kerakyatan tetap hidup tetapi tidak melupakan

kesejahteraan rakyat. Politik demokrasi adalah alat untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pandangan Bung Hatta tentang ekonomi Pancasila juga memiliki pemikiran senada. Ekonomi Pancasila adalah sistem alternatif dari sistem kapitalis maupun komunis yang telah berkembang sebelumnya. Sendi-sendiri ekonomi Pancasila betumpu pada ajaran-ajaran seperti musyawarah mufakat, kekeluargaan maupun gotong royong (Itang 2016).

Jika SI melandaskan semua perjuangannya pada Islam atau ketauhidan, maka Pancasila pun memiliki sprit yang sama. Bung Hatta mengatakan bahwa Ketuhanan yang Maha Esa adalah fondasi moral dan sila-sila yang lain adalah fondasi politik. Artinya, dengan ketuhanan yang menjadi dasar moral, maka hal itu akan menuntun jalannya negara dengan kebenaran, kebaikan, keadilan, kejujuran maupun persaudaraan (Hatta 1966). Ajaran Tuhan adalah basis etik yang akan membawa kemajuan bangsa Indonesia. Maka, ada keyakinan bahwa seorang muslim yang sejati semestinya mencintai dan bekerja untuk rakyat dan negeri yang ia tempati (Sukarno 1964). Lebih jauh, seorang yang beragama (apapun agamanya) dengan sebaik-baiknya maka tindakan dan moralitasnya juga akan baik dan berpengaruh positif bagi Indonesia yang multikultural.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dakwah dan pendidikan yang diperjuangkan SI semakin menegaskan bahwa pembuahan nilai-nilai Pancasila sudah dimulai sejak masa-masa awal pergerakan nasional. SI memainkan peran penting dalam proses intelektual dan kultural untuk membangun kesadaran akan kebangsaan (nasionalisme), kemanusiaan, pemerintahan yang demokratis, penegakkan keadilan, serta keberagamaan. Kesadaran-kesadaran tersebut terus membentuk dialektika pemikiran-ideologis, hingga akhirnya menjadi nilai yang terus digali oleh *founding fathers* ketika merumuskan Pancasila. Nilai-nilai yang diperjuangkan SI

memang masih berbasiskan agama Islam, tetapi bibit-bibit dari gagasan Pancasila sudah ada di dalamnya. Artinya, gagasan kebangsaan sampai kesejahteraan sudah diperjuangkan oleh SI dengan berlandaskan agama Islam, sebelum akhirnya gagasan-gagasan itu terus berdialektika secara historis hingga gagasan kebangsaan sampai kesejahteraan itu dikonstruksi dengan berlandaskan konsep ketuhanan atau keagamaan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, N F. 2020. "Pancasila Sebagai The Living Values Dalam Pengalaman Sejarah Kebangsaan Indonesia." *Jurnal Candi* 20 (01): 99–110.
- Adams, C. 2014. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno.
- Amelz. 1952. *HOS Tjokroaminoto Hidup Dan Perjuangannya*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Amin, M M. 1996. *Sarikat Islam Obor Kebangkitan Nasional (1905-1942*. Yogyakarta: Al Amin Press.
- Basri, Yusmar. 1997. *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional Dan Masa Akhir Hindia Belanda*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dahm, B. 1987. *Sukarno Dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES.
- Djaelani, A T. 2017. *Gerakan Sarekat Islam: Kontribusinya Pada Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Elson, Robert. 2008. *The Idea of Indonesia: A History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fahrudin, A. 2020. *Nasionalisme Soekarno Dan Konsep Kebangsaan Mufassir Jawa*. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Fathani, A T, and Z Qodir. 2020. "Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila." *Jurnal Al-Qalam* 260 (1): 117–128.
- Gani, M A. 1984. *Cita Dasar Pola Perjuangan Syarikat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hakim, A R, and Wirano. 2020. "Konsep Pendidikan Islam Perspektif H.O.S Tjokroaminoto." *Urwatul Wutsqo* 9 (01): 140–159.
- Hatta, M. 1966. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pusataka Antara.
- Itang. 2016. *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*. Serang: Laksita Indonesia.
- Kartini. 2014. *Moeslim National Onderwijs: Pemikiran Pendidikan Tjokroaminoto*. Jakarta: Pustaka Mazaya.
- Korver, A V E. 1985. *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil*. Jakarta: Grafitipers.
- Latif, Y. 2012. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maftuhin, Sumarjono, and N Umamah. 2017. "The Movement Of Sarekat Islam's Politics In Struggling National Independence In 1918-1945." *Jurnal Historica* 01 (02): 239–254.
- Mansur. 2013. "Kontribusi Sarekat Islam Dalam Membentuk Masyarakat Madani Melalui Pendidikan." *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 7 (2): 409–430.
- Marihandono, D, and dkk. 2015. *H.O.S. Tjokroaminoto: Penyemai Pergerakan Kebangsaan Dan Kemerdekaan*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.
- Mokodenseho, S. 2020. "Pendidikan Dan Politik: Gerakan Sarekat Islam Di Sulawesi Utara Periode 1920-1950 (Tesis." <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57524>.
- Mulawarman, A D. 2015. *Jang Oetama: Jejak Dan Perjuangan H.O.S. Tjokroaminoto*. Yogyakarta: Galang Pustaka.
- Muljana, S. 2012. *Kesadaran Nasional Dari*

- Kolonialisme Sampai Ke-Merdekaan Jilid I*. Yogyakarta: LKiS.
- Nagazumi, Akira. 1986. *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial Ekonomi Abad XIX Dan XX Dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Naqib, F A. 1997. *Syarikat Islam Bukan Budi Utomo: Meluruskan Sejarah Pergerakan Bangsa*. Jakarta: CV. Datayasa.
- Nasihin. 2012. *Sarekat Dagang Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Niel, R V. 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Noer, D. 1996. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Pringgodigdo, A K. 1967. *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rahmad, L N, and A Trilaksana. 2021. "Bahasa Indonesia Dan Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia 1925 Sebagai Dasar Persatuan Kaum Intelektual Indonesia Tahun 1925 – 1928." *AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah* 11 (01).
- Rambe, S. 2008. *Sarekat Islam: Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942*. Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia.
- Rasyid, S, and A Tamara. 2020. "Sarekat Islam Penggagas Nasionalisme Di Indonesia." *Jurnal Rihlah* 8 (1): 66–84.
- Rizkianto, A. 2020. "Kepemimpinan Karismatik H.O.S." *Tjokroaminoto Di Sarekat Islam. Inteleksia: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 02 (01): 55–80.
- . 2021. *Relasi Agama Dan Pancasila: Mengukuhkan Karakter Kebangsaan*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Rosenthal, F. 1971. *Four Essays on Art and Literature in Islam*. Leiden: Ej. Brill.
- Ruslin, I T. 2012. *Pemikiran Politik Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press.
- Scherer, Savitri Prastiti. 1985. *Keselarasn Dan Kejanggalan; Pemikiran-Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Edited by Terjemahan S Rumbo. Jakarta: Sinar Harapan.
- Soeprapto, S. 2013. "Konsep Muhammad Hatta Tentang Implementasi Pancasila Dalam Perspektif Etika Pancasila." *Jurnal Filsafat* 23 (02): 99–116.
- Sukarno. 1964. *Tjarkan Pantja Sila! Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 1996. *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam Di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Studidja, T. 2007. *H.O.S. Tjokroaminoto (1883-1934): Yang Gigih Membela Rakyat Kecil*. Bandung: PT. Rakasta Samasta.
- Tjokroaminoto, H O S. 1985. *Tafsir Program Asas Dan Program Tandhim Syarikat Islam*. Jakarta: Yayasan Binasari.
- . 2010. *Islam Dan Sosialisme*. Bandung: Segarsy.
- Utama, W S. 2014. "Pancasila: Sebuah Monumen Atau Leitstar Dinamis?" *Lembaran Sejarah* 11 (01): 99–108.
- Wal, S.L.Van Der. 1963. *Het Onderwijsbeleid in Nederlandsch Indie 1900-1942*. Groningen: J.B. Wolters.
- Yatim, B. 1999. *Soekarno, Islam Dan Nasionalisme*. Jakarta: Logos.
- Zed, M. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.